

Governance Of State University Joint Entrance Selection (SBMPTN) During COVID 19 Pandemic

Imanudin Kudus¹, Heru Nurasa², Ida Widianingsih³, Nina Karlina⁴

¹Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran
imanudin.kudus@unpad.ac.id¹; hnurasa@yahoo.com²; ida.widianingsih@unpad.ac.id³;
karlina_nina@yahoo.com⁴;

ABSTRACT

The 2020 State Higher Education Entrance Joint Selection (SBMPTN) is carried out completely computer-based (CBT), with the number of participants served as many as 713,319 participants which in its implementation requires the availability of an adequate number of test equipment at each State University Computer-Based Test (CBT) Center. This has an impact on the length of the exam administration time with a large number of exam sessions. This condition requires good governance related to the assignment of people in the administration of the State University (CBT) Center especially in the conditions of the Covid 19 pandemic, where the implementation of the CBT SBMPTN in 2020 is faced with conditions of crowd restrictions and the application of health protocols that are strictly enforced. Of course, it requires unusual treatment.

This study aims to see how the governance of the exam implementation in the Covid-19 pandemic conditions, covering institutional aspects, human resources, exam systems and infrastructure from planning, implementation to evaluation. Practically, this study aims to provide input for policy improvement in the form of recommendations for good governance models in the implementation of the Joint Selection for State Universities in Indonesia during the Covid 19 pandemic.

The research was conducted using qualitative methods. The results of this study indicate that the implementation of computer-based examination governance in the Covid-19 pandemic requires a breakthrough outside the normal conditions of the examination, especially in the substance and number of items tested as well as the allocation of participants in the session and exam room.

Keywords: *Governance; Computer Based Test (CBT); State Higher Education Joint Selection (SBMPTN); Pandemic; Covid 19*

PENDAHULUAN

Penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Pola penerimaan melalui SBMPTN dapat memberikan kesempatan kepada seluruh siswa lulusan sekolah menengah yang mempunyai potensi dan kemampuan akademik terbaik di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan program sarjana di PTN di Indonesia tanpa diskriminasi. Di samping itu SBMPTN diharapkan dapat membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, meningkatkan edukasi nasional penggunaan teknologi informasi, percepatan pembangunan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan sebagai wahana perekat bangsa karena dapat diikuti oleh siswa lintas wilayah di seluruh Indonesia sehingga dalam kampus PTN terbangun komunitas yang Bhinneka Tunggal Ika.

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; (3) fleksibel, yaitu pelaksanaan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh lebih dari satu kali tes; (4) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan (5) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah. Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum calon mahasiswa lulus pendidikan menengah atas. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi saat ini, pelaksanaan SBMPTN tidak hanya dilaksanakan dengan model *Paper Based Test*

(PBT), tetapi mulai Tahun 2016 Panitia Nasional SBMPTN mulai mengembangkan UTBK SBMPTN dengan jumlah peserta sebanyak 2.512 orang. Peningkatan jumlah peserta ujian menggunakan UTBK bertambah lagi pada tahun 2017 menjadi 20.860 orang. Tahun 2018, peserta UTBK mejadi 26.180 orang yang terbagi menjadi dua model ujian yaitu UTBK berbasis desktop (25.180 peserta) dan UTBK berbasis Android (1.000 peserta). Sesuai kebijakan dari Kemenristek Dikti, maka pada tahun 2019 sekarang, seluruh peserta ujian dilayani dengan menggunakan UTBK dengan perubahan mekanisme pendaftaran, dengan mengedepankan transparansi informasi khususnya hasil ujian UTBK. Tahun 2019, jumlah peserta yang harus dilayani dengan menggunakan UTBK sebanyak 1.295.621 peserta. Tahun 2020, jumlah peserta yang dilayani sebanyak 713.319 peserta.

Perbedaan mendasar antara pelaksanaan model UTBC dan UTBK adalah pada media pengerjaan, dengan tingkat kesulitan soal yang sama baik untuk UTBC maupun UTBK, dimana bagi peserta ujian dengan UTBC membaca soal dalam bentuk cetak dan mengisi jawaban pada lembar jawaban Komputer (LJK). Sedang pada UTBK peserta menerima soal dalam bentuk aplikasi ujian dan memilih jawaban yang dianggap benar pada menu aplikasi tersebut. Karakteristik dari tes ini sama dengan tes tertulis yaitu menggunakan satu perangkat tes untuk beberapa peserta dengan waktu tes yang sama. Perbedaannya lainnya adalah penyampaian naskah soal dan penerimaan hasil ujian dilakukan dengan cara *Online Transaction Processing*. Pelaksanaan SBMPTN sebelumnya diselenggarakan oleh Panitia ad-hoc yang dibentuk dibawah mandate dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan struktur Panitia Pusat sebagai regulator dan Panitia Lokal di tingkat Kota sebagai pelaksana teknis yang secara staffing diisi oleh orang-orang dari Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota tersebut. Dalam pelaksanaannya, karena Struktur Panitia Pusat dan Panitia Lokal setiap tahun dipimpin oleh rector dari PTN yang ditunjuk, maka salah satu konsekuensi yang timbul adalah setiap tahun terjadi perpindahan

sekretariat sesuai dengan lokasi PTN yang memimpin kepanitiaan tersebut (Ketua Panpus). Dalam proses bisnis penyelenggaraan SBMPTN ada beberapa lini yang perlu dikelola oleh kepanitiaan baik terutama secara system ujian dan kebijakan di tingkat Panitia Pusat (Panpus). Dari mulai pendaftaran, penyusunan soal (substansi) ujian, pengembangan system (aplikasi) ujian, pengelolaan hasil sampai penetapan kelulusan. Tata Kelola yang berjalan dalam bentuk penugasan terhadap Perguruan Tinggi Negeri secara bergantian untuk setiap proses bisnis tersebut. Hal ini menyulitkan terutama terkait dengan pengembangan system (aplikasi) ujian untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), karena pengembangan system merupakan proses riset berkelanjutan yang setiap tahun akan dikembangkan dan disempurnakan dengan mengimplementasikan teknologi terkini dalam bidang teknologi informasi.

Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) membentuk institusi bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang merupakan pengganti Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (Panpus SN-PMB PTN) untuk 2019. LTMPT dibentuk agar panitia pelaksana penerimaan mahasiswa baru tidak terus berganti-ganti setiap tahunnya. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang disingkat LTMPT sebagai lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa masuk perguruan tinggi. Peran utama LTMPT dalam SBMPTN adalah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SBMPTN, melaksanakan UTBK, memberikan informasi hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Peralihan Panitia Pusat ke LTMPT yang bertepatan dengan penerapan sistem pelaksanaan ujian dengan sepenuhnya menggunakan berbasis komputer atau UTBK dilakukan salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan yang berkelanjutan baik dari sisi infrastruktur pelaksanaan ujian maupun aplikasi ujian yang digunakan, dimana dengan bentuk Lembaga permanen diharapkan dapat memberikan kepastian pengembangan system dan pengelolaan

implementasi ujian. Selain itu juga dengan pelaksanaan ujian yang menggunakan system UTBK secara menyeluruh memerlukan ketersediaan jumlah perangkat ujian yang memadai di setiap Pusat UTBK PTN. Dimana dengan jumlah infrastruktur yang ada berdampak pada waktu penyelenggaraan ujian yang panjang dengan jumlah sesi ujian yang banyak. Kondisi ini memerlukan tata kelola yang baik terkait dengan penugasan orang dalam penyelenggaraan di Pusat UTBK PTN, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 pada pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi pembatasan kerumunan dan penerapan protokol Kesehatan yang tentunya memerlukan pengelolaan khusus.

Penelitian terdahulu tentang Tata Kelola organisasi dan Pendidikan Tinggi diantaranya adalah dari Asley Symes & Thierry M. Luescher (2007) yang membahas tentang budaya pengolaan Pendidikan tinggi di Afrika Selatan, yang berada pada periode transisi karena adanya penggabungan secara kelembagaan. Studi kasus dilakukan pada 12 lembaga Pendidikan tinggi yang mewakili system Pendidikan secara keseluruhan. Temuannya adalah adanya 4 sistem tata Kelola yang diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan keterwakilan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas organisasi, dan kapasitas untuk implementasi kebijakan. Bersama-sama, jenis tata kelola ini membentuk budaya organisasi dengan karakteristik yang berbeda. Studi kasus menunjukkan bahwa praktik tata kelola dibentuk oleh sejarah kelembagaan dan serangkaian kepentingan kompleks yang memiliki daya tahan yang mungkin memerlukan lebih dari sekadar undang-undang untuk diubah.

Penelitian selanjutnya dari Shingo Hanada (2013) yang membahas kebijakan privatisasi system pendidikan tinggi. Di Jepang, pemerintah nasional memperkenalkan National University Corporation Act (NUCA) pada tahun 2004 dan mengubah status hukum universitas nasional dari lembaga publik milik pemerintah menjadi lembaga administrasi independen. Tujuannya adalah untuk menggabungkan mereka, memberikan presiden kekuasaan keleluasaan dan mendorong kemandirian finansial dan administrasi otonom. Temuannya adalah NUCA selama periode 6 tahun pertama

(2004-2009) diperiksa berdasarkan analisis data. Kriteria analisisnya adalah perkembangan ke arah kemandirian finansial, administratif dan intelektual, disertai dengan peningkatan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Warangkana Lin & Rui Yang (2020) yang membahas peranan negara dalam tata Kelola perguruan tinggi negeri di Taiwan dalam masyarakat Konfusianisme, meskipun sistem pendidikan tinggi modern mereka dibangun di atas pengalaman Barat. Penelitian ini membahas peran negara bagian dalam menyegarkan universitas di Taiwan dalam upaya mereka meraih status kelas dunia. Temuannya adalah bahwa peran negara tetap menonjol dengan pendekatan desentralisasi dan kontrol pemerintah yang tersentralisasi. Studi ini akhirnya menantang beberapa anggapan konvensional tentang tata kelola pendidikan tinggi di Taiwan.

Penelitian lainnya dari Tom Doyle & Malcolm Brady (2018) membahas tentang bentuk organisasi yang saat ini diadopsi oleh lembaga pendidikan tinggi didasarkan pada model organisasi perusahaan tradisional yang mengambil pendekatan rasional untuk manajemen perubahan organisasi. Temuannya adalah teori atau model organisasi alternatif yang menawarkan persepsi berbeda tentang sumber dan pola perubahan organisasi di pendidikan tinggi. Teori-teori ini memandang organisasi lebih sebagai entitas yang muncul di mana perubahan terus menerus, seringkali tidak dapat diprediksi dan muncul terutama dari interaksi lokal. implikasi yang mungkin diterima dari paradigma alternatif untuk menyusun strategi dan mengubah kepemimpinan di lembaga pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa akomodasi paradigma perubahan pengembangan kelembagaan dalam pendidikan tinggi itu sendiri bisa menjadi proses yang muncul.

Sementara penelitian tentang seleksi di level Pendidikan tinggi salah satunya adalah yang dilakukan Sakari Ahola & Anu Kokko (2010) yang membahas system seleksi penerimaan mahasiswa di Finlandia yang berbeda dengan banyak negara lain di Eropa, yaitu didasarkan pada ujian masuk yang cukup berat dan mahal. Pemerintah mendorong universitas menuju

kolaborasi timbal balik, dan menyerukan sistem penerimaan yang lebih sederhana, lebih transparan, dan adil, dengan dilakukannya Kerjasama dalam melakukan seleksi dalam rangka menemukan siswa terbaik. Temuannya adalah harmonisasi yang sedang berlangsung dari dunia pendidikan tinggi Eropa, kami telah mencoba untuk menilai kelayakan sistem aplikasi saat ini dalam jangka panjang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dengan pengumpulan informasi bagaimana implementasi di masing-masing pusat UTBK PTN, termasuk kendala yang dihadapi secara teknis dalam pelaksanaan ujian baik dalam aspek pengelolaan SDM, administrasi keuangan, maupun tata kelola ujian terutama pada saat kondisi pandemi Covid 19.

Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder mengacu pada berbagai bentuk laporan penelitian, dokumen, arsip, atau dokumentasi visual lainnya. Baik data primer juga sekunder yang akan dikumpulkan di lapangan merupakan penggalan dari konsep yang diurai pada konteks riset.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk melihat untuk melihat bagaimana peranan LTMPPT dalam membangun tata kelola pelaksanaan ujian terkait dengan proses bisnis yang harus dijalankan yang meliputi aspek kelembagaan, SDM, system ujian dan infrastruktur dari mulai perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk membuat memberi masukan untuk perbaikan kebijakan dalam bentuk rekomendasi model tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Governance dan Good Governance

Governance saat ini menjadi sebuah istilah yang cukup sering terdengar. Hal ini juga sering ditambah dengan kata “*Good*” yang menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dibahas adalah tata kelola yang dievaluasi secara positif. Dalam *Oxford English Dictionary*, mendefinisikan *governance* sebagai ‘tindakan atau cara memerintah’, itu juga termasuk dalam definisi ‘keteraturan yang baik’, terutama dalam ‘mengatur tata kelola’. (Munshi, Abraham, & Cahudhuri, 2009, p. 1)

Governance bermaksud mewujudkan kekuasaan yang dilaksanakan dalam pengelolaan negara, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk bekerja dalam kohesi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih besar. Konsep *governance* ini yang muncul dengan memiliki banyak definisi tetapi tidak memiliki keseragaman. Namun beberapa definisi dan interpretasi mungkin bertemu pada praktik administrasi yang baik yang berfokus pada mengarahkan kembali prioritas negara, revitalisasi lembaga negara dan membangun aliansi baru dengan masyarakat sipil dan sekarang menonjol dalam agenda pembangunan. (Khawaja, 2011, pp. 1-2) Masih menurut Khawaja (2011, p. 3), Konsep *governance* ini meluas ke penggunaan otoritas atau mandat yang sah yang diabadikan dalam konstitusi negara tertentu dan implikasinya terhadap kehidupan politik dan ekonomi rakyat. Penggunaan kewenangan administratif untuk mengelola urusan negara secara bijaksana, efisien, efektif, merata, dan semata-mata dapat membenarkan bahwa pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan penetapan kebijakan dan pengelolaan program. *Governance* secara luas mencakup susunan kompleks, proses, interaksi, hubungan, dan institusi pemerintah mengelola urusan masyarakat. Peran kunci dilakukan oleh orang-orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam pemberian pelayanan publik. Definisi yang tidak jauh berbeda dimiliki *good governance*, menurut Sadjijono (2007, p. 203) *good governance* adalah merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norm yang berlaku cita-cita Negara. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkna dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapta diterima oleh seluruh masyarakat.

Jadi konsep *governance* ini berkaitan langsung dengan pengelolaan proses pembangunan, yang melibatkan baik sektor publik maupun swasta. Ini mencakup fungsi dan kemampuan sektor publik, serta aturan dan institusi yang menciptakan kerangka kerja untuk pelaksanaan bisnis publik dan swasta, termasuk akuntabilitas kinerja ekonomi dan keuangan, dan kerangka peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, korporasi, dan kemitraan. Secara luas, *governance* adalah tentang lingkungan kelembagaan dimana warga negara berinteraksi di antara mereka sendiri dan dengan lembaga dan pejabat pemerintah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu kegiatan lembaga pemerintahan yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat serta norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara yang dimana kekuasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang telah diatur dalam berbagai hal tingkatan pemerintahan negara yang ada kaitannya dengan berbagai hal seperti ekonomi, sosial, dan budaya politik.

Sedangkan Bank Dunia dalam Khawaja (2011, p. 13) telah mengidentifikasi bidang-bidang utama yang dapat mempengaruhi *good governance* diantaranya meliputi:

- a) Manajemen sektor publik
- b) Akuntabilitas
- c) Kerangka hukum untuk pembangunan
- d) Transparansi dan informasi.

Selain itu Bank Pembangunan Asia dalam Khawaja (2011, p. 15) telah mengidentifikasi empat bidang utama pemerintahan di mana reformasi diperlukan secara horizontal maupun vertikal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Area-area ini adalah:

- a) Akuntabilitas
- b) Manajemen sektor publik
- c) Manajemen perusahaan publik
- d) Manajemen keuangan publik
- e) Reformasi pegawai negeri
- f) Partisipasi

- Partisipasi penerima manfaat dan kelompok yang terkena dampak
- g) Antarmuka sektor publik/sektor swasta
 - h) Desentralisasi fungsi pemberian layanan publik
 - i) Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
 - j) Prediktabilitas
 - k) Hukum dan pembangunan
 - l) Kerangka hukum untuk pengembangan sektor swasta
 - m) Akses dan kualitas penyampaian layanan
 - n) Kemitraan publik-swasta
 - o) Transparansi
 - p) Keterbukaan informasi
 - q) Akses ke informasi
 - r) Hindari Disinformasi dan uji coba media
 - s) Keandalan informasi

Computer Based Testing (CBT)

Computer Based Testing (CBT) secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan ujian yang dikerjakan dengan sistem komputerisasi sehingga tidak memerlukan kertas, pena maupun pensil dalam pengerjaannya. Labulan & Effendi (2012: 41) mengungkapkan bahwa *Computer Based Test (CBT)* adalah metode test dimana pengaturan setiap respon jawaban disimpan, dinilai, atau keduanya secara elektronik.

Computer Based Testing merupakan inovasi yang dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tes. Soal-soal dan kunci jawaban dibuat dalam bentuk data elektronik sehingga meningkatkan kemungkinan pelaksanaan tes yang lebih efektif bila dibandingkan dengan tes berbasis kertas. Selain itu CBT juga meningkatkan keamanan dan kerahasiaan hasil tes. Arikunto (2012: 72-73) menyatakan bahwa suatu tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi lima persyaratan yaitu tes yang valid (validitas), reliabilitas yang tinggi, objektivitas, praktis (praktikabilitas), dan ekonomis.

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Computer Based Testing atau tes berbasis komputer dapat dilaksanakan dalam laboratorium komputer yang telah terkoneksi

dengan jaringan dan sistemnya. Dalam pelaksanaan tes berbasis komputer (CBT) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : ke-otentikan peserta test, bank soal dan sistem Computerbased test itu sendiri. Proses otentikasi dalam tes berbasis komputer (CBT), merupakan hal yang sangat penting, untuk menentukan siapa saja yang bisa mengikuti tes. Biasanya dalam proses ini, peserta tes akan diberikan sebuah username dan password, yang akan digunakan untuk login sehingga peserta dapat masuk dan mengikuti tes. Ketersediaan soal menjadi syarat selanjutnya dalam tes berbasis komputer (CBT). Dari jumlah soal yang cukup banyak memungkinkan pemilihan soal secara random sehingga antar peserta tes akan mendapatkan soal yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh peserta test.

Pemanfaatan CBT dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya ada empat bentuk model tes berbasis komputer dan internet, yaitu :

Terbuka (Open Mode)

Tes dengan model terbuka seperti ini, dapat diikuti siapapun dan tanpa pengawasan siapapun, contohnya tes yang dapat diakses secara terbuka di internet. Peserta tes tidak perlu melakukan registrasi peserta.

Terkontrol (Controlled Mode)

Tes dengan model seperti ini, sama dengan tes dengan model terbuka yaitu tanpa pengawasan siapapun, tetapi peserta tes hanya yang sudah terdaftar, dengan cara memasukkan *username* dan *password*.

Supervised Mode

Pada model ini terdapat supervisor yang mengidentifikasi peserta tes untuk diotentikasi dan memvalidasi kondisi pengambilan tes. Tes di internet mode ini menuntut administrator tes untuk meloginkan peserta dan mengkonfirmasi bahwa tes telah diselesaikan dengan benar pada akhir tes.

Managed Mode

Model ini biasanya tes dilaksanakan secara terpusat. Organisasi yang mengatur proses tes dapat mendefinisikan dan meyakinkan unjuk kerja dan spesifikasi peralatan di pusat tes. Mereka juga melatih kemampuan pegawai/staff untuk mengontrol jalannya tes.

SBMPTN merupakan seleksi proses seleksi bersama bagi calon mahasiswa baru yang hendak masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). SBMPTN menggunakan sistem ujian tertulis yang diselenggarakan secara nasional bagi selirih calon mahasiswa baru. SBMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar dari calon mahasiswa dengan melihat kemampuan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*) yang meliputi tes potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar, bidang sains dan teknologi (*saintek*) dan bidang sosial humaniora (*soshum*). Tujuan dari dilaksanakannya SBMPTN ini adalah mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi pada tingkat perguruan tinggi dengan baik dengan syarat utama adalah telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/ MA/ SMK/ MAK atau sederajat.

Penyelenggaraan SBMPTN pertama kali terjadi pada tahun 2008 dengan nama SNMPTN Tertulis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. SBMPTN dilaksanakan secara tertulis menggunakan soal ujian yang terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan validitas, tingkat kesulitan dan daya pembeda yang memadai.

SBMPTN di Indonesia terus mengalami perubahan, salah satunya terjadi pada tahun 2018 dimana SBMPTN tidak hanya memperhitungkan jumlah soal yang dijawab dengan benar dan salah oleh peserta, tetapi juga memperhitungkan karakteristik setiap soal khususnya tingkat kesulitan relatif dan sensitifitasnya dalam membedakan kemampuan peserta.

Metode penilaian oleh Panitia Pusat dilakukan melalui 3 tahap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap I, seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberi skor 1 (satu) pada setiap jawaban yang benar, dan skor 0 (nol) untuk setiap jawaban yang salah atau tidak dijawab/kosong.

Tahap II, dengan menggunakan pendekatan Teori Respons Butir (*Item Response Theory*) maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya, diantaranya adalah tingkat kesulitan relatifnya terhadap soal yang lain, dengan mendasarkan pada pola respons jawaban

seluruh peserta tes tahun 2018. Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan relatif mudah, sedang, maupun sulit.

Tahap III, karakteristik setiap soal yang diperoleh pada Tahap II digunakan untuk menghitung Skor setiap peserta. Soal-soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang relatif lebih mudah. Tahap-tahap penghitungan skor ini dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran dan penilaian.

Dengan metode penilaian baru ini, maka setiap peserta yang dapat menjawab jumlah soal yang sama dengan benar, akan dapat memperoleh nilai yang sama atau berbeda tergantung pada soal mana saja yang mereka jawab dengan benar. Metode penilaian ini sudah lama digunakan secara meluas di negara-negara maju di Amerika dan Eropa karena dengan menyertakan karakteristik setiap soal dalam penilaian, skor yang diperoleh akan lebih “fair” dan dapat membedakan kemampuan peserta dengan lebih baik.

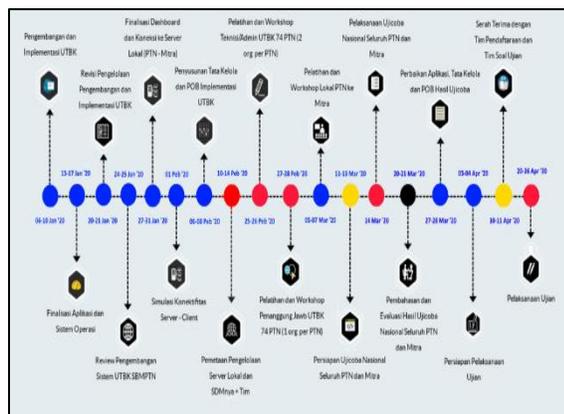
Indonesia sendiri kini telah menggunakan sistem *computer based test* (CBT) dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi perguruan tinggi negeri dengan nama Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK merupakan sebuah tes potensi skolastik berbasis komputer yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif serta tes kompetensi akademik bagi calon mahasiswa sebagai syarat nilai untuk masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut SBMPTN.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, UTBK-SBMPTN haruslah mengikuti prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraannya, yakni adil, akuntabel, fleksibel, efisien dan transparan. UTBK-SBMPTN diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP), dimana LTMP merupakan lembaga non-struktural di lingkungan Kementerian.

Pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dalam kondisi Pandemi Covid19

Penyelenggaraan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mengalami perubahan menjadi ujian tulis yang sepenuhnya berbasis komputer atau disebut dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada tahun 2019. Pada tahun berikutnya yaitu pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020, terjadi perubahan rencana secara drastis dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia yang diantaranya di Indonesia masuk pada bulan Maret tahun 2020. Hal ini menjadi krusial bagi pelaksanaan ujian tersebut dikarenakan pada awalnya ujian akan dilakukan pada bulan April tahun 2020 tepatnya mulai tanggal 20 April 2020 harus mundur sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian berakhirnya pandemi tersebut. Kondisi pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan tentu saja membuat persiapan yang harus dilakukan mengalami hambatan yang berat apalagi pada awal April 2020 diagendakan untuk persiapan pelaksanaan ujian. Untuk lebih jelasnya mengenai timeline dari pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar.1 Timeline Pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2020



Sumber : Laporan Pelaksanaan UTBK Tahun 2020

Dengan adanya pandemi Covid19, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya ujian dengan tetap memperhatikan berbagai aspek protokol kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau dikenal dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Akuntabilitas; dengan mengkombinasikan prosedur pelaksanaan ujian yang telah disusun dan dijadikan patokan untuk penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) agar menghasilkan luaran dari proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan protokol kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid19. Hal ini dilakukan agar upaya pencapaian tujuan dari pelaksanaan ujian tidak menjadi kontradiktif dengan upaya penanganan pandemi Covid19 yang sedang melanda Indonesia pada saat itu. Partisipasi; untuk dapat menjalankan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 yang berlangsung pada kondisi pandemi Covid19, perlu dilakukan upaya melibatkan berbagai pihak yang menjadi ujung tombak penanganan pandemi Covid19 seperti pihak pemerintah daerah setempat yang menjadi penanggungjawab wilayah tempat pelaksanaan ujian, beserta dengan jajarannya terutama Satgas Penanganan Covid19.

Prediktabilitas; LTMPT dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diantaranya

dengan menyusun berbagai skenario kontingensi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalnya ada peserta yang kemungkinan berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian dikarenakan yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit atau terkena virus Covid19, disediakan kesempatan untuk melakukan ujian susulan dengan memperhatikan rekomendasi dari Satgas Covid19 setempat.

Transparansi; dalam melakukan persiapan penjadwalan ulang pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020, LTMPT secara berkala memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai setiap progres koordinasi yang dilakukan agar dapat memberikan pemahaman terhadap kondisi yang dihadapi dan kemungkinan skenario yang akan dijalankan.

Dari beberapa hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) berupaya sedemikian rupa untuk tetap menjalankan mekanisme yang tepat untuk menjaring calon mahasiswa bagi berbagai Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia dengan berbagai kendala yang dihadapi sebagai akibat dari kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Berbagai alternatif dimunculkan dengan berbagai analisis terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing dan dengan memperhatikan resiko yang dapat terjadi serta dengan tetap memperhatikan aspek kualitas penyelenggaraan ujian tersebut. Adapun berbagai alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

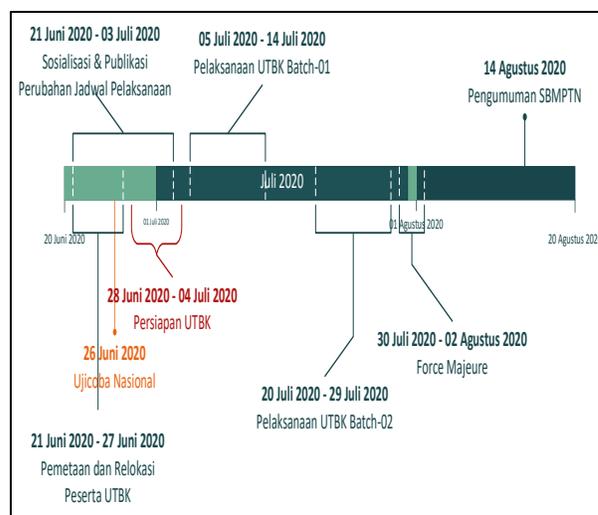
Diselenggarakan ujian dengan metode ujian online ditempan/rumah masing masing peserta;

Digunakannya nilai Raport siswa dengan memperhitungkan berbagai koefisien untuk menentukan nilai UTBK;

Pelaksanaan ujian dengan tersentralisasi berbasis komputer seperti halnya penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2019 dengan mengurangi jumlah soal ujian dan hanya memberlakukan 1 jenis tes yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS), dan mengurangi jumlah peserta per ruangan dengan hanya menggunakan kuota 50% dari kapasitas setiap ruang ujian.

Dengan berbagai pertimbangan, dipilih opsi nomor 3 dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung yang salah satunya adalah jumlah sesi ujian yang bertambah karena adanya pengurangan kuota peserta per ruang ujian karena adanya pembatasan 50% kapasitas ruang ujian. Selain hal tersebut, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) juga harus memformulasikan berbagai prosedur dan panduan tambahan untuk pelaksanaan ujian pada kondisi pandemi Covid19 yang meliputi prosedur yang harus dilakukan oleh panitia, pengawas, maupun peserta ujian.

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 setelah melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak pada akhirnya diselenggarakan dengan 3 batch yaitu batch pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 14 Juli, batch kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 29 Juli, dan batch 3 yang khusus diselenggarakan untuk mengantisipasi terjadinya force majeure pada pelaksanaan ujian batch 1 dan batch 2 yang dialokasikan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 2020. Adapun lebih jelasnya untuk timeline perubahan dari pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Timeline Perubahan Pelaksanaan UTBK SBMPTN Tahun 2020.

Sumber : Panduan Pelaksanaan UTBK tahun 2020, LTMPT

Untuk data pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 yang diikuti oleh 713.319 peserta dilakukan dengan melibatkan 73 Pusat UTBK PTN yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah server ujian sebanyak 466 server, serta 2.397 ruang ujian. Sebaran peserta ujian pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 itu sendiri terdiri dari 558.192 peserta untuk pelaksanaan Ujian pada Batch 1, 153.252 peserta untuk pelaksanaan ujian pada Batch 2 dan 1.875 peserta untuk pelaksanaan ujian pada Batch 3. Untuk lebih jelasnya mengenai data pelaksanaan ujian tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

NO	SESI	PESERTA			NO	SESI	PESERTA		
		TOTAL	HADIR	TIDAK			TOTAL	HADIR	TIDAK
1	1	37.927	35.695	2.232	21	41	13.733	12.837	896
2	3	37.615	35.133	2.482	22	43	12.608	11.733	875
3	5	37.992	35.373	2.619	23	45	11.978	11.151	827
4	7	38.113	35.116	2.997	24	47	10.791	9.984	807
5	9	36.511	33.781	2.730	25	49	10.546	9.762	784
6	11	36.056	33.284	2.772	26	51	9.722	8.924	798
7	13	35.340	32.502	2.838	27	53	9.357	8.582	775
8	15	34.407	31.943	2.464	28	55	8.653	8.038	615
9	17	32.235	30.079	2.156	29	57	9.295	8.656	639
10	19	31.217	29.140	2.077	30	59	8.016	7.437	579
11	21	30.241	28.296	1.945	31	61	6.503	6.015	488
12	23	28.035	26.102	1.933	32	63	6.244	5.803	441
13	25	26.247	24.544	1.703	33	65	5.823	5.255	568
14	27	23.867	22.211	1.656	34	67	4.859	4.506	353
15	29	22.080	20.647	1.433	35	69	3.937	3.679	258
16	31	21.479	19.909	1.570	36	71	2.197	2.063	134
17	33	18.760	17.475	1.285	37	73	1.890	1.714	176
18	35	16.512	15.283	1.229	38	75	1.708	1.553	155
19	37	13.558	12.599	959	39	79	1.875	1.319	556
20	39	15.392	14.332	1.060					
					JUMLAH		713.319	662.455	50.864

Sumber : Laporan Pelaksanaan UTBK tahun 2020, LTMPT

Adapun rekapitulasi kehadiran peserta pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Kehadiran Peserta UTBK SBMPTN Tahun 2020

NO	ITEM	JUMLAH
A.	Total Peserta UTBK	713.319
B.	Jumlah Server Lokal	466
C.	Jumlah Ruang Ujian yang digunakan	2.397
D.	Jumlah Test Center (Pusat UTBK PTN)	73
E.	Jumlah Sesi Ujian	39
F.	Peserta Ujian berdasarkan Gelombang	
	1. Peserta Ujian Mendaftar GelO1	558.192
	2. Peserta Ujian Mendaftar GelO2	153.252
	3. Peserta Ujian Mendaftar GelO3	1.875
G.	Peserta Ujian Umum dan Tunanetra	
	1. Umum (Non-Tunanetra)	713.230
	2. Tunanetra	89

Sumber : Laporan Pelaksanaan UTBK tahun 2020, LTMPT.

Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2020 yang berlangsung pada kondisi pandemi Covid19 secara umum adalah sebagai berikut :

Protokol Covid yang menyebabkan terjadinya perubahan rencana dan skenario pelaksanaan Ujian.

Infrastruktur jaringan, kendala ini terjadi karena pada koneksi yang kurang baik antara *server* dan *client* yang mengakibatkan nilai *rto* (*request time out*) sangat tinggi dan berakibat *countdown timer* yang berjalan tidak normal. Selain itu ada juga kendala yang terjadi antara koneksi server dan server pusat (*dashboard*) yang mengakibatkan proses di beberapa tahapan terkendala.

Ketersediaan pasokan listrik yang terbatas, terjadi karena perbaikan sarana/prasarana jaringan listrik, pembangkit utama daya listrik bermasalah.

Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pergeseran sesi UTBK yang dilaksanakan pada hari yang sama sehingga seluruh peserta yang terkendala dengan masalah tersebut dapat mengikuti ujian sebagaimana seharusnya.

SIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan UTBK dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada kendala dalam pelaksanaan namun dapat diselesaikan dengan baik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Diperlukan persiapan yang memadai terkait perubahan skenario dan waktu pelaksanaan ujian akibat Pandemi Covid 19. Kondisi yang terjadi pada tahun 2020 waktu yang ada hanya kurang dari 2 minggu dengan aspek perubahan yang harus disiapkan termasuk dengan pelaksanaan ujicoba dan persiapan lainnya terkait sistem ujian.

Pelaksanaan UTBK sebanyak 39 sesi yang dilaksanakan dalam waktu 5 minggu menjadi catatan yang perlu diperhatikan karena pelaksanaan ini cukup melelahkan khususnya tim teknis (korpel, kortik, dan admin *server*) yang harus bekerja setiap hari. Hal ini perlu kiranya menjadi perhatian lebih, karena hal ini akan sangat menguras energi dan stamina semua pihak yang terlibat terutama tim IT dan tim pelaksana ujian yang harus standby selama pelaksanaan ujian dari Batch 1 sampai Batch 3, yang tentunya dapat berisiko menurunkan imunitas yang justru dibutuhkan pada saat pandemi Covid 19.

Kendala yang terjadi selama pelaksanaan ujian, perlu dicarikan solusi yang terbaik sehingga tidak terulang lagi pada pelaksanaan UTBK di masa yang akan datang.

Diperlukan persiapan yang lebih baik, khususnya untuk mengantisipasi kendala infrastruktur jaringan komputer, ketersediaan pasokan listrik dan *force majeure* dengan ujicoba menyeluruh untuk setiap perangkat *client*, disediakan daya listrik cadangan yang cukup khususnya di lokasi yang rawan ketersediaan listrik utama.

Pemanfaatan *computer client* yang ada di mitra sebaiknya dipertimbangkan kembali karena hampir keseluruhan kendala yang muncul terjadi di mitra.

Rangkaian pelaksanaan ujian yang memakan waktu cukup lama (5 minggu) diakibatkan dari adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan ujian per hari nya hanya dapat dilaksanakan 2 sesi dengan pengurangan jumlah peserta per sesi.

REFERENSI

- Ahola, Sakari & Kokko, Anu (2010) *Finding the Best Possible Students: Student selection and its problems in the field of business*, Journal of Higher Education Policy and Management, Volume 23, 2001 - Issue 2, Pages 191-203
- Arikunto, S. (2012). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Doyle, Tom & Brady, Malcolm (2018) *Reframing the university as an emergent organisation: implications for strategic management and leadership in higher education*, Journal of Higher Education Policy and Management, Volume 40, 2018 - Issue 4, Pages 305-320
- Hanada, Shingo (2013) *Japan's higher education incorporation policy: a comparative analysis of three stages of national university governance*, Journal of Higher Education Policy and Management, Volume 35, 2013 - Issue 5, Pages 537-552
- Khawaja, S. (2011). *Good Governance and Result Based Monitoring*. Islamabad: Poorab Academy.
- Labulan P.M. dan Effendi F. (2012). Pengembangan Smart Try Out Syste Berbasis Komputer pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Kejuruan. AKSIOMA. 01 (01), 83-93.
- Lin, Warangkana & Yang, Rui (2020) *Centralising, decentralising, and recentralising: a case study of the university-government relationship in Taiwan*, Journal of Higher Education Policy and Management, Volume 43, 2021 - Issue 1, Pages 67-90
- Munshi, S., Abraham, B. P., & Cahudhuri, S. (2009). *The Intelligent Person's Guide to Good Governance*. New Delhi: Sage Publicatiins Inc.
- Sudjijono. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang.
- Symes, Ashley & Luescher, Thierry M. (2004) *The culture of governance in South African public higher education*, Journal of Higher Education Policy and Management, Volume 26, 2004 - Issue 1, Pages 91-107